

**“PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA
KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
KOTA BENGKULU”**

Setiandini Merchilia¹, Robinson²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
E-mail: setiandinimerchilia@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
E-mail: robin76kph@gmail.com

Abstract

This research aims to prove the influence of accountability and transparency on the financial performance of regional government organizations in the city of Bengkulu. This research uses a quantitative type of research using primary data. The data collection technique was obtained through a questionnaire, the sampling method used in this research was a sampling census of 30 Regional Apparatus Organizations with representatives of 2 financial employees in each agency. This research uses a multiple linear regression analysis method which is processed using SPSS 25. The research results showed that accountability had a positive and significant effect on financial performance, while transparency had a negative and significant effect on the financial performance of Bengkulu City Regional Apparatus Organizations. It is hoped that this research will have benefits and influence on the development of government agency performance. If the government realizes the importance of an accountable and transparent government on government financial performance.

Keywords: *Accountability, Transparency, Financial Performance, Regional Government Organizations.*

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah melakukan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya (Putu dan Indraswarawati, 2021). Perubahan regulasi pengelolaan keuangan dari waktu ke waktu merupakan rangkaian bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik (Ridwan & Syaiful, 2023). Saat ini masyarakat menuntut pemerintah lebih terbuka dan memberikan ruang untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga masyarakat bisa memantau dan mengawasi kinerja pemerintah.

Kinerja pemerintah dapat dikatakan baik bisa dilihat dari pencapaian hasil kinerja yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal serta tercapai sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Di Indonesia, suatu daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri daerahnya yang disebut dengan otonomi daerah. Kepercayaan atas pengelolaan daerah ini menjadikan kinerja dalam pelaksanaan pemerintah menjadi sorotan publik. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri jika mampu menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya atau mampu menyelenggarakan otonomi daerah yang baik memiliki ciri dan kemampuan dibidang keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan keuangan daerah mendefinisikannya sebagai semua aktivitas atau kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan daerah. Suryani dan Robinsyah (2022) menyatakan bahwa dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka akan berdampak pada kinerja keuangan daerah yang baik pula. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kewajiban bagi instansi pemerintahan, sehingga dapat diketahui kinerja instansi tersebut. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, setiap instansi diharapkan dapat dilakukan secara akuntabel dan transparansi, sehingga dalam penilaian kinerja dapat tergambar kondisi semestinya instansi tersebut.

Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja keuangan diharapkan dapat mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang saling keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh dalam meningkatkan kinerja suatu instansi atau organisasi Suryana et al., (2017). Menurut Edowati et al., (2021) akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik. Selain akuntabilitas, transparansi juga merupakan hal penting dalam tercapainya kinerja yang baik.

Menurut Edowati et al., (2021) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Suatu instansi pemerintahan dapat dikatakan transparan apabila penyelenggaraan pemerintah dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa menyeleksi dan mengevaluasi kinerja pemerintah (Laga & Hidayat, 2021). Dengan tercapainya transparansi, maka dapat membantu mengurangi peluang terjadinya *fraud* atau kecurangan. Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, perumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu?

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan pengaruh terhadap perkembangan kinerja instansi pemerintahan. Penelitian terkait kinerja keuangan telah menarik banyak perhatian di kalangan peneliti dan praktisi. Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya telah menghasilkan keluaran yang bertentangan dan tidak meyakinkan mengenai kinerja keuangan terhadap kemajuan ekonomi secara umum (Ridwan dan Berto, 2019). Apabila pemerintah menyadari pentingnya pemerintah yang akuntabel dan transparan maka masyarakat sebagai pihak yang memberikan amanah akan dapat mengawasi secara langsung terhadap penggunaan dana yang berasal dari mereka serta mengawasi kinerja dari pemerintah, selain itu adanya transparansi yang diterapkan pemerintah akan mempermudah masyarakat mengakses laporan pertanggung jawaban dari pemerintah yang berbentuk laporan keuangan. Terwujudnya

transparansi dalam pemerintahan akan membantu masyarakat ikut berperan aktif dalam pemerintahan sebagai pihak pengendali dan pengawas. Adanya peran dari masyarakat tersebut maka akan dapat mewujudkan pemerintahan akuntabel yang dapat dipercaya mengemban amanah masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Teori *stewardship* menjelaskan tentang situasi dimana manajemen tidak memiliki motivasi untuk tujuan pribadi akan tetapi lebih mengutamakan atau mengedepankan tujuan atau kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 2013). Pada teori *stewardship* memiliki suatu pilihan antara perilaku *self serving* dan *pro organization*. Perilaku *steward* tidak bias dipisahkan dari kepentingan organisasi. *Steward* kemudian akan mengesampingkan *self serving* untuk berperilaku *kooperatif*. Sehingga walaupun kepentingan *steward* dengan masyarakat (*principal*) berbeda, maka *steward* tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan karena memiliki manfaat yang lebih besar pada perilaku kooperatif dan kemudian perilaku tersebut dapat diterima dan dianggap rasional. Peneliti menggunakan teori tersebut karena dianggap teori ini, karena peneliti menganggap teori ini dirasa cocok dihubungkan dengan kinerja anggaran karena dengan penyusunan anggaran yang lebih baik maka diharapkan pemerintah daerah bias meningkatkan kualitas kinerja anggaran yang lebih baik, tanpa ada kebocoran dana. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bekerja di sector publik akan lebih mengedepankan kepentingan orang lain di bandingkan dengan kepentingan individu (pribadi yang lebih menguntungkan).

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemegang amanah untuk mengelola, mengungkapkan dan kemudian melaporkan segala aktivitas yang dalam proses pembuatan keputusan anggaran (Nico Adrianto, 2017). Akuntabilitas adalah salah satu dari prinsip *good government governance*, yaitu sebuah rancangan/konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Rasul (2012) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan sekelompok ataupun seseorang terhadap masyarakat luas didalam suatu organisasi. Sedangkan Annisaningrum (2010) berpendapat bahwa akuntabilitas ialah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada perusahaan atau entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban dari suatu pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara periodic kepada masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi. Menurut Novatiani et.al, (2019) akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi beserta indikator yang meliputi : (1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum; (2) Akuntabilitas proses; (3) Akuntabilitas program; dan (4) Akuntabilitas kebijakan.

Good Government (pemerintah yang baik) merupakan salah satu ekspektasi atau tujuan dari *Good Government*, selain pelaksanaan prinsip akuntabilitas juga tidak kalah pentingnya juga penerapan prinsip keterbukaan (transparansi). Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber dayapublik kepada pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2004). Lebih lanjut pentingnya prinsip transparansi lebih dikuatkan lewat UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, didalamnya dijelaskan azas transparansi (keterbukaan) pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut UNDP (dalam Mardiasmo, 2009) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkannya. Novatiani et al., (2019) menyatakan bahwa prinsip-prinsip transparansi

menekankan pada dua aspek dengan indikator-indikatornya, yaitu: (1) Informatif; (2) Keterbukaan; dan (3) Pengungkapan.

Kinerja atau *job performance* memiliki arti prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang. Berdasarkan sisi jumlah dan mutu tertentu, ukuran kinerja bersifat *tangible* (dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya) atau *intangible* (tak dapat ditetapkan alat ukurnya atau standarnya). Menurut Mangkunegara (2017), kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang didapatkan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas fungsi sesuai dengan tanggung jawab yang mereka miliki. Dessler (2014) juga mengungkapkan bahwa kinerja ataupun prestasi kerja dapat digambarkan melalui perbandingan hasil kerja yang dihasilkan dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan Mathis & Jackson (2006) menyatakan bahwa kinerja merupakan bentuk dari sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pegawai. Sehingga kinerja pegawai akan mempengaruhi kinerja organisasi, tergantung seberapa banyak pegawai memberikan kontribusi kepada organisasi. Menurut Mahsun (2017: 196) terdapat beberapa indikator kinerja keuangan pemerintah daerah yang meliputi: (1) Indikator Masukan (*Input*); (2) Indikator Proses (*Process*); (3) Indikator Keluaran (*Output*); (4) Indikator Hasil (*Outcome*); dan (4) Indikator Manfaat (*Benefit*).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta empiris, fakta empiris yang akan diperoleh melalui pengumpulan data maka, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elkha & Wahidawati, (2020) dan (Nasution, 2018) yang mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa memberikan pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan, dimana semakin baik bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat, maka semakin baik pula pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya. Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja

b. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

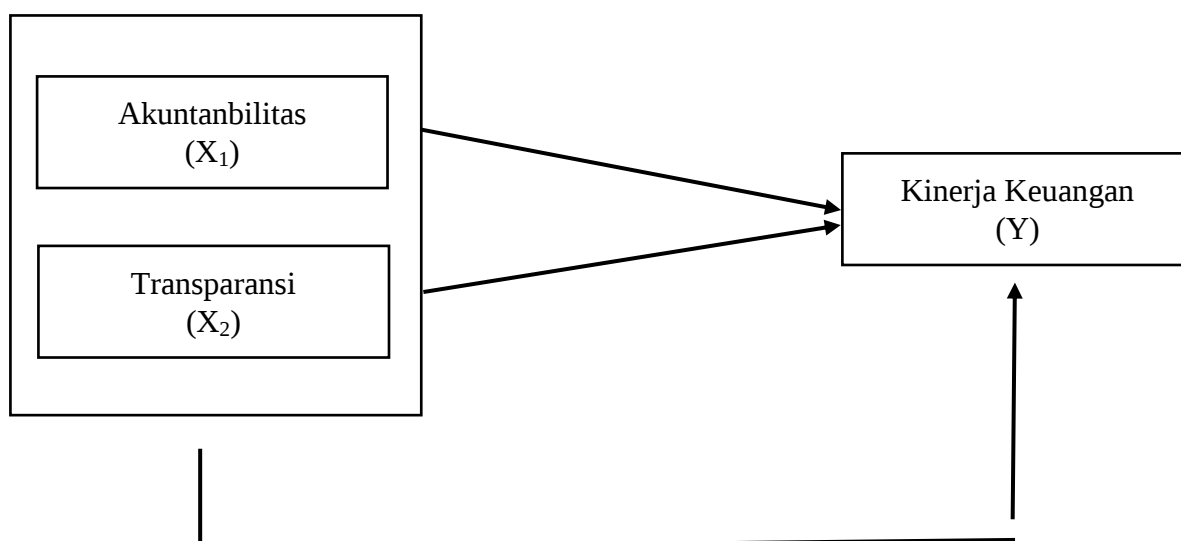
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Edowati, et.al. (2021) dan Elkha & Wahidawati, (2020) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan Informasi yang memadai dan mudah dipahami dan digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi. Akses untuk memperoleh informasi sangatlah penting dalam menjamin pertanggungjawaban pemerintah. Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja

c. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Organisasi Perangkat Daerah

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Edowati, et.al. (2021) dan Elkha & Wahidawati, (2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃ : Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja



Gambar 1. Kerangka Penelitian

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh dari jawaban responden dan kuesioner yang diberikan. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bengkulu yang berjumlah 30. Adapun teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2015). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu yang terdiri dari 23 Dinas dan 7 Badan Pemerintahan Kota Bengkulu yang setiap instansinya diambil 2 orang pegawai sebagai sampelnya. Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 sampel.

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu akuntabilitas dan transparansi. Di sisi lain, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Semua variabel diukur dengan menggunakan skala likert. Di mana respon terendah yang mengindikasikan perilaku kecurangan akademik diberi skor 1, sedangkan yang tertinggi diberi skor 5.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dimana data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka dan kemudian dianalisis dengan sistem statistik. Pengumpulan sumber data dalam penelitian ini berbentuk data primer. Metode pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner berbentuk *google form* yang diberikan tautan melalui pesan *WhatsApp* kepada pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu.

Teknik analisa dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan variabel penelitian sesuai dengan fenomena lapangan (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, dilakukan perhitungan frekuensi jawaban dan nilai rata-rata jawaban responden terhadap parameter-parameter penelitian yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi adalah suatu metrik statistik digunakan dalam analisis regresi untuk mengukur seberapa besar variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model. Dalam penelitian ini koefisien determinasi dapat digunakan

untuk mengevaluasi pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan OPD. Penelitian ini menggunakan uji T sebagai metode untuk menguji hipotesis dan juga uji F dengan memakai alat bantu statistik berupa SPSS versi 25.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sejumlah pegawai yang bekerja pada 30 OPD Kota Bengkulu yang berjumlah sebanyak 60 orang pegawai. Tingkat pengisian kuesioner dalam penelitian ini (*Response rate*) yakni sebesar 100%. Sebelum dilakukan hasil analisis data dalam penelitian ini, maka akan dilakukan uji instrument penelitian guna menguji seberapa valid dan andalnya suatu instrument yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Uji Validitas

Setelah dilakukan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 25, maka akan dapat disajikan hasil uji validitas dari tiap item pernyataan pada masing-masing variabel penelitian. Untuk lebih jelasnya uji validitas atas variabel akuntabilitas dapat disajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

N o	Variabel	Signifikan	Keterangan
1	Kinerja Keuangan	0.000	Valid
2	Akuntabilitas	0.000	Valid
3	Transparansi	0.000	Valid

Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa variabel kinerja, akuntabilitas dan transparansi semuanya berada pada nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 ini berarti, semua variabel adalah valid.

b) Uji Reliabilitas

Sehingga dengan hasil pengolahan data kuesioner dengan menggunakan program SPSS Versi 25 maka dapat disajikan hasil uji reliabilitas melalui tabel berikut ini :

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha ^a	N of Items
,786	12

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka dapat diketahui bahwa nilai setiap variabel diatas 0,786, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat realibilitas variabel yang digunakan dalam penelitian ini baik serta kuesioner pada setiap variabel akan mampu digunakan untuk memperoleh data yang konsisten sehingga semua instrument pernyataan kuesioner menunjukkan keandalan dalam mengukur variabel dalam penelitian ini.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	49,860	1,353		36,843	,000
	Akuntabilitas	,346	,036	,647	9,481	,000
	Transparansi	-,540	,041	-,906	-13,278	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka dapat diketahui bahwa:

1. Variabel akuntabilitas (X_1) diperoleh nilai *sign* sebesar 0,000 dengan $\alpha = 0,05$, serta diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,481 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.672. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka kinerja keuangan juga akan semakin tinggi.
2. Variabel transparansi (X_2) diperoleh nilai *sign* sebesar 0,000 dengan $\alpha = 0,05$, serta diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -13,278 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.672. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, tapi transparansi tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah dikarenakan tidak adanya keterbukaan anggaran terhadap masyarakat secara menyeluruh dan masih bersifat tertutup.

Kemudian untuk menguji pengaruh secara serempak atau bersama-sama antara variabel akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah maka digunakan pengujian simultan (Uji F), yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 5 Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18,669	2	9,335	98,777	,000 ^b
	Residual	5,387	57	,095		
	Total	24,056	59			

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Berdasarkan data hasil uji f maka diperoleh nilai $F_{hitung} = 98,777$ dan memiliki nilai *sign* = 0,000, dengan nilai *sign* 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memberikan pengaruh secara serempak atau bersama-sama terhadap kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu.

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,881 ^a	,776	,768		,307

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Berdasarkan tabel 6 di atas, maka diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,776 atau 77,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi sebesar 77,6% oleh variabel akuntabilitas, dan transparansi. Sedangkan sebanyak 22,4% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Setiap instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja. Kedua laporan tersebut harus dapat menjelaskan seluruh hasil dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat menilai apakah pemerintah telah melaksanakan kinerjanya secara ekonomis, efisien, dan efektif (Kashan & Saiful, 2020 - 994).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana dalam teori ini pertanggungjawaban laporan keuangan harus berdasarkan kepentingan organisasi, maka dengan hal itu harus adanya pengendalian yang baik untuk pelaksanaan kerja, serta dalam menghasilkan laporan keuangan yang bersifat efisien, andal dan dapat dipercaya. Karena, akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari teori *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomi dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban *steward* kepada pemberi tanggungjawab (Mardiasmo, 2002).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elkha & Wahidawati, (2020) dan (Nasution, 2018) yang mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bisa memberikan pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan, dimana semakin baik bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat, maka semakin baik pula pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya.

Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi dalam hal ini terkait pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Keterbukaan OPD dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah termasuk kegiatan yang dilakukan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik sehingga menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel.

Teori *stewardship* jika dikaitkan dengan transparansi yaitu prinsip keterbukaan dari pemerintah daerah yang bertindak sebagai *stewards* dalam memberikan informasi yang

berhubungan dengan aktivitas dalam mengelola sumberdaya publik kepada masyarakat (*principal*) untuk mendapatkan informasi dengan seluas-luasnya tanpa adanya keterbatasan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah baik berupa penyajian laporan keuangan ataupun informasi lainnya yang diperlukan oleh *principal* demi tercapainya kepuasan bagi pengguna informasi (*principal*). Penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang memiliki asumsi bahwa pejabat OPD sebagai pelayan masyarakat harus menjunjung tinggi kejujuran. Sedangkan kejujuran merupakan acuan dari prinsip transparansi itu sendiri. Suatu pelaporan keuangan dianggap transparan jika informasi yang ada dalam pelaporan keuangan tersebut disajikan secara terbuka.

Hasil penelitian ini memperoleh bahwa transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya, setiap kenaikan 1 angka transparansi akan menurunkan 0,41 koefisien kinerja keuangan. Hal ini berarti bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, tapi transparansi tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah dikarenakan tidak adanya keterbukaan anggaran terhadap masyarakat secara menyeluruh dan masih bersifat tertutup. Hal ini sejalan dengan penelitian Syawaludin (2021) yang menyatakan bahwa transparansi public berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Edowati, et.al. (2021) dan Elkha & Wahidawati, (2020) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aswadi (2014) yang memperoleh hasil transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan Informasi yang memadai dan mudah dipahami dan digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi. Akses untuk memperoleh informasi sangatlah penting dalam menjamin pertanggungjawaban pemerintah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka kinerja keuangan juga akan semakin tinggi.
2. Transparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Artinya, setiap kenaikan 1 angka transparansi dapat menurunkan 0,41 koefisien kinerja keuangan. Hal ini berarti bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan, tapi transparansi tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah dikarenakan tidak adanya keterbukaan anggaran terhadap masyarakat secara menyeluruh dan masih bersifat tertutup

DAFTAR PUSTAKA

- Annisaningrum. 2010. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi
- Dessler, Gary. 2014. Manajemen sumber daya manusia (terj.), edisi 14. Jakarta. Salemba Empat.

- Donaldson, L., & Davis, J. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49-64
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Elkha, F., & Wahidawati. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–19.
- Kashan & Saiful, 2020. *Risk Management, Sustainable Governance Impact On Corporate Performance. Journal of Security and Sustainability Issues, Volime 9< Issue 3.*
- Laga, Y. M. V. I., & Hidayat, M. T. (2021). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Sebelas. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE.
- Mathis, R L. Jackson, J H. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta. Salemba Empat.
- Nasution, dito darma nasution. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–262.
- Nico, Andrianto. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Novatiani, R. Ait; Aprilia Sp, Andily. (2014). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Study And Accounting Research* Vol Xr, No. 3 – 2014.
- Putu, Sri. Indraswari, (2017) ‘Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, Kapitalisasi Pasar dan Kepemilikan Publik pada Tingkat.Pengungkapan CSR’, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 20 (2), pp. 1219–1248.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Ridwan, N, & Berto, U. 2019. *Impact of Financial Development on Income Inequality and Poverty in ASEAN. Jurnal Institutions and Economies*, Vol.11, No. 3, pp. 1-38.

Ridwan, N, & SYaiful. 2023. *Moderating role of risk management effectiveness on corporate social responsibility- corporate performance relationship. Jurnal Institutions and Economies*,

Suryana. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. Metode Penelitian Kualitatif, 17, 43.
[Http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/Bab Iii.Pdf](http://Repository.Unpas.Ac.Id/30547/5/Bab%20Iii.Pdf)